



KEMENTERIAN KEUANGAN

APBN 2019

**Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui
Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Konferensi Pers
31 Oktober 2018



Pokok Bahasan

1 **Perekonomian Dunia dan Domestik**

2 **APBN 2019**



1

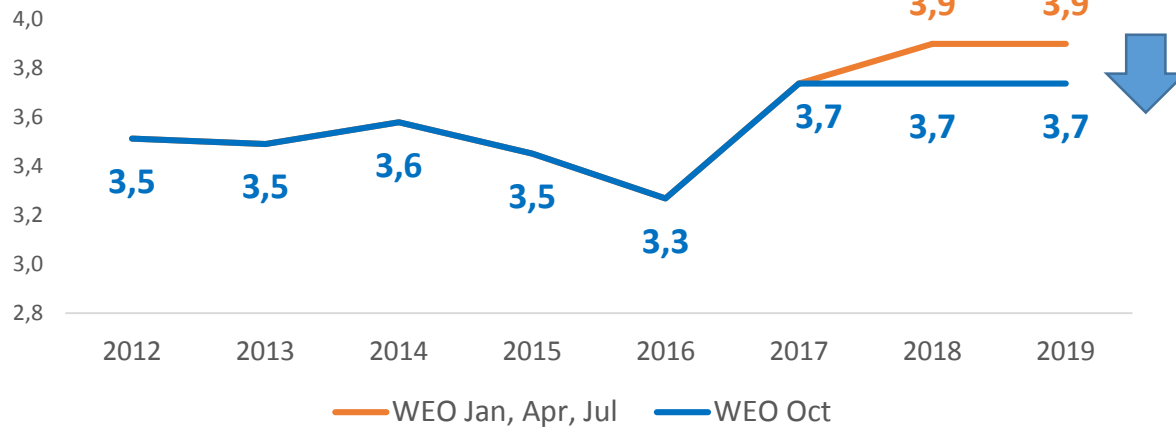
Perekonomian Dunia dan Domestik



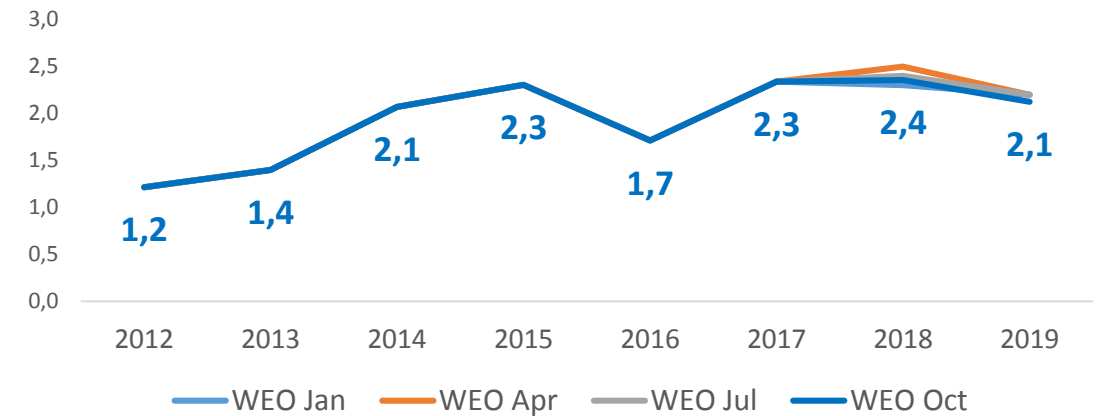
Risiko global meningkat seiring tensi perdagangan yang semakin intensif dan likuiditas yang mengetat

Dalam World Economic Outlook Oktober 2018, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2018-2019

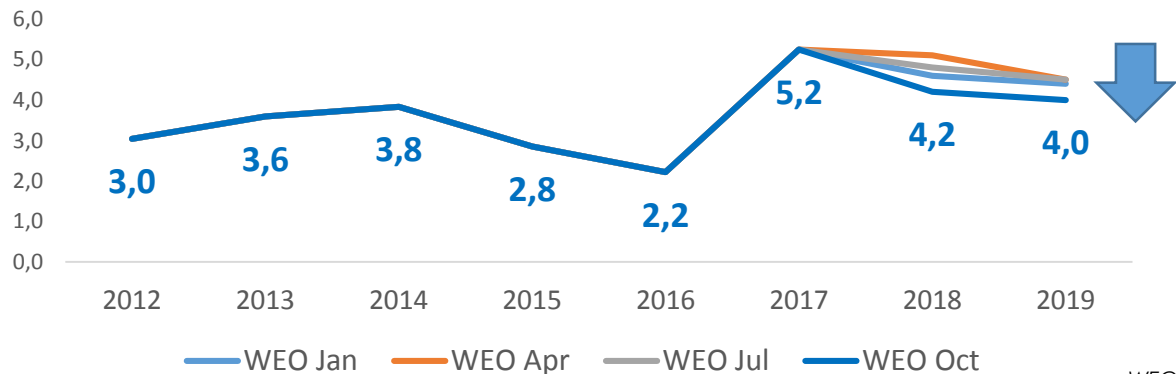
PERTUMBUHAN PDB GLOBAL(%)



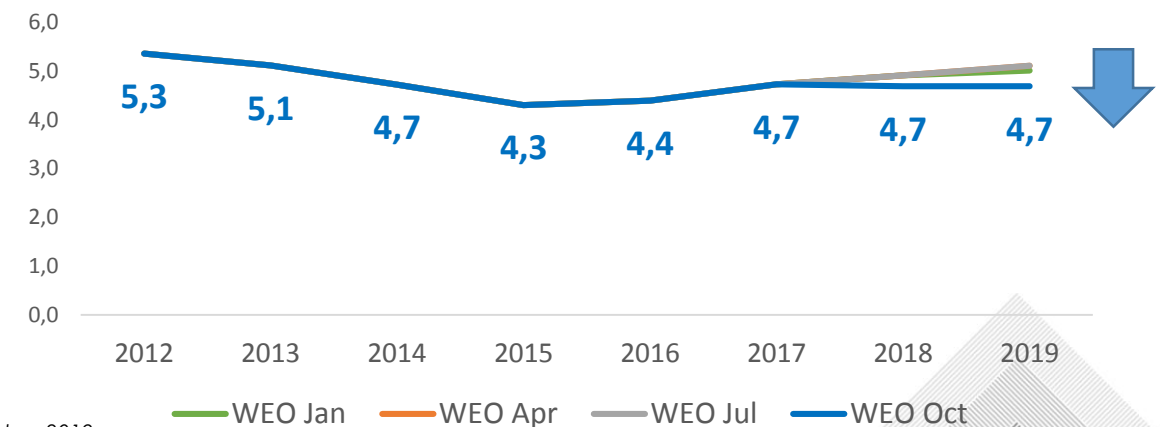
PERTUMBUHAN PDB NEGARA MAJU (%)



PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL (%)

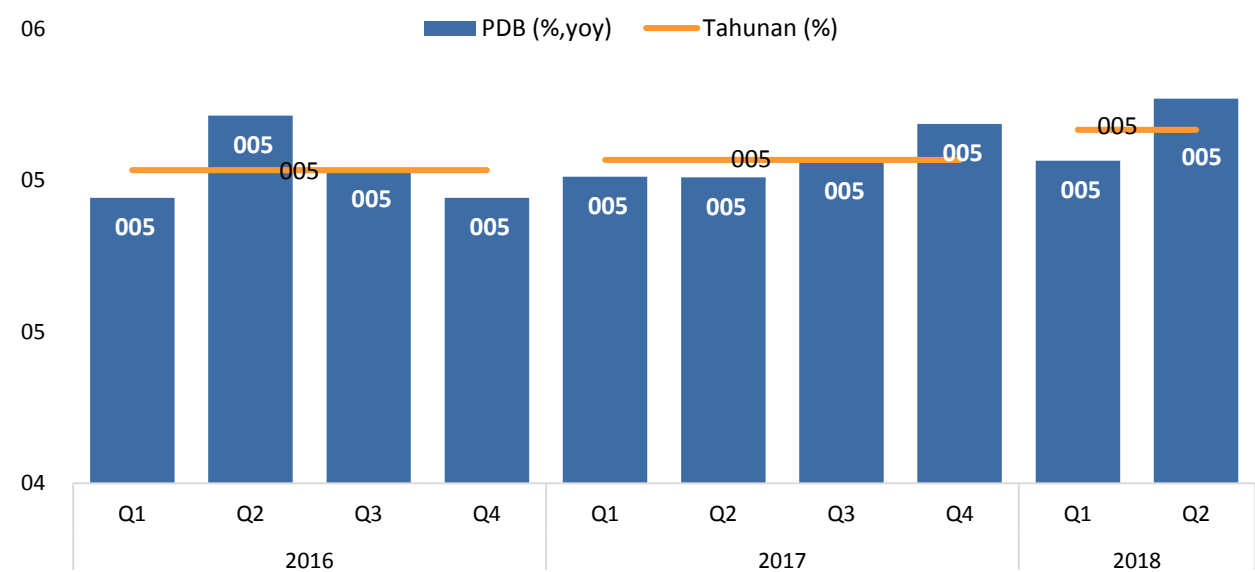


PERTUMBUHAN PDB NEGARA BERKEMBANG (%)



source: WEO IMF, October 2018

Di tengah fluktuasi global, fundamental ekonomi domestik sampai dengan Kuartal II 2018 relatif stabil yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat

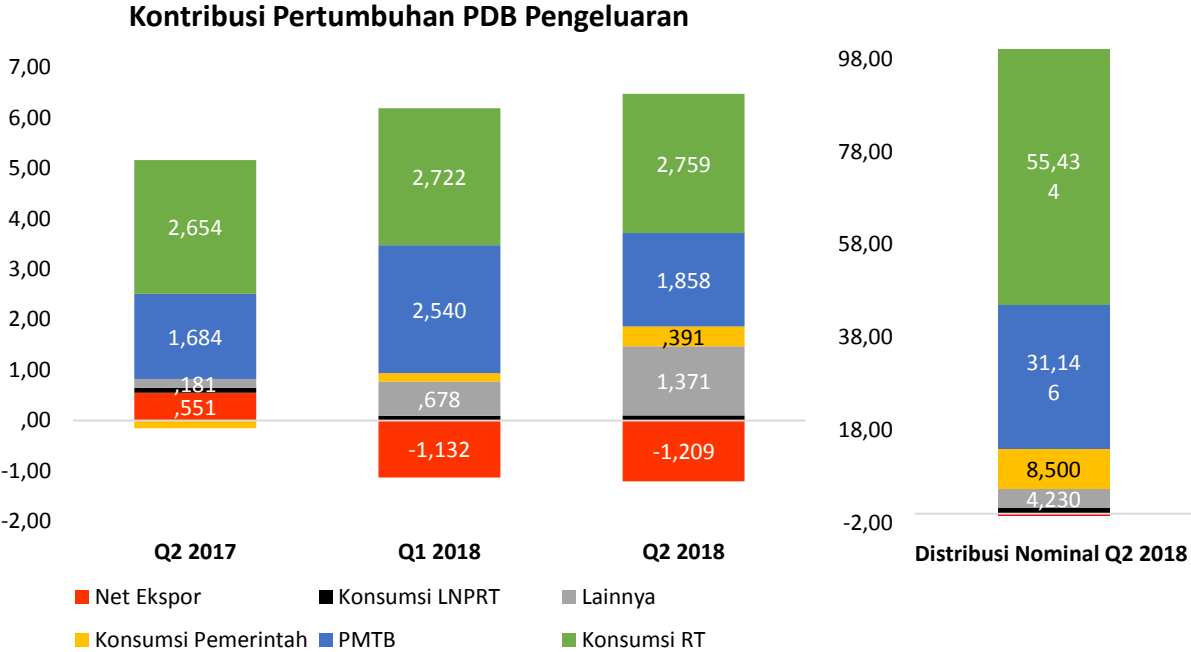


Sumber: BPS, Diolah

Kontribusi PDB Sektoral (yoy)

SEKTOR	Q2 2016	Q2 2017	Q2 2018	Distribusi Q2 2018
Primer <i>Pertanian dan Pertambangan</i>	2.56	2.81	3.81	21.55
Sekunder <i>Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi</i>	4.82	4.32	4.61	31.25
Tersier <i>Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya</i>	6.34	5.21	5.81	43.16

- **Dari sisi produksi**, pertumbuhan didukung oleh semua sektor primer, sekunder, dan tersier yang tumbuh lebih tinggi dari Q2 2017, menandakan membaiknya aktivitas produksi barang dan jasa.
- Walaupun mempunyai struktur PDB paling kecil sektor tersier secara rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor primer dan sekunder.



- **Pertumbuhan Q2 2018 mencapai 5,27% tertinggi sejak tahun 2014**
- **Sisi Pengeluaran:**
 - Kontribusi konsumsi RT semakin meningkat di Q2 2018.
 - Kontribusi PMTB menurun tajam di Q2 dibandingkan Q1 2018, namun tetap lebih tinggi dari Q2 2017.
 - Komponen Lainnya meningkat tajam terkait dengan tingginya pertumbuhan inventori .
 - Perdagangan internasional masih menunjukkan kontribusi negatif sejalan dengan tingginya impor terkait aktivitas produksi dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 diproyeksikan akan membaik

Komponen PDB	2019
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,0
Ekspor	6,3
Impor	7,1
Pertumbuhan PDB	5,3

- Penyelesaian **pembangunan infrastruktur** diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi.
- **Tingkat konsumsi** diperkirakan masih tumbuh baik, terutama bersumber dari penciptaan lapangan kerja dan tingkat inflasi yang terjaga.
- Namun demikian tahun 2019 terdapat banyak **tantangan**, termasuk tekanan dari volatilitas sektor keuangan global yang bersumber dari kebijakan moneter AS dan ketidakpastian dalam perdagangan global akibat perang dagang,
- Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan investasi di tengah upaya menjaga **stabilitas perekonomian** (*stability over growth*)

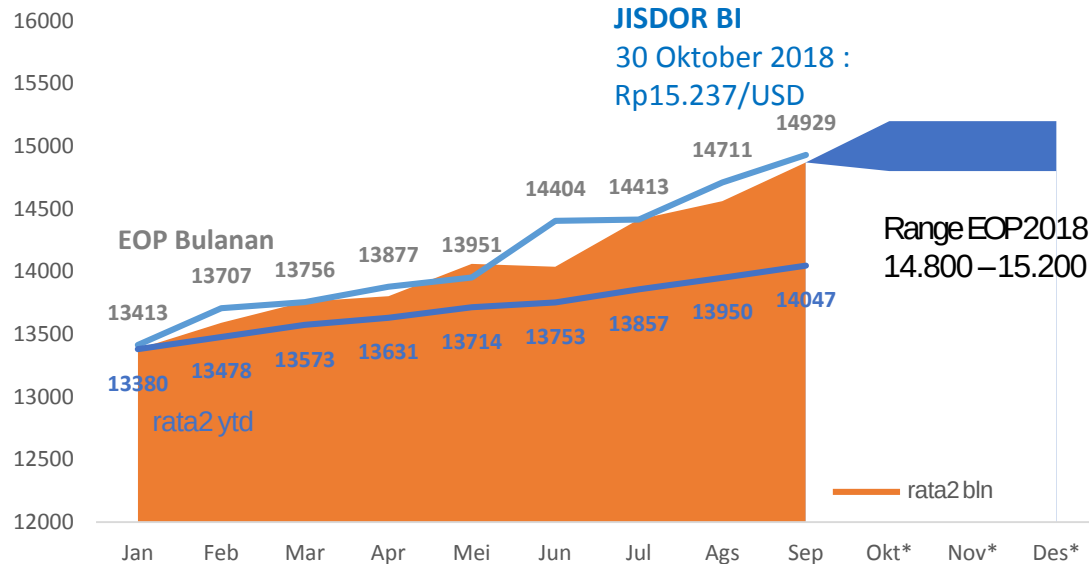
PERTUMBUHAN MENURUT PRODUKSI

- **Sektor Industri Pengolahan** terus didorong sebagai penggerak pertumbuhan. Fokus pada industri unggulan, a.l. : pangan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik sejalan dengan roadmap *Making Indonesia 4.0*
- **Sektor Perdagangan** diperkirakan meningkat seiring daya beli masyarakat yang terjaga serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa domestik serta ekspor-impor
- **Sektor Konstruksi** tetap konsisten tumbuh tinggi seiring dengan investasi bangunan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- **Sektor Transportasi dan pergudangan** tumbuh tinggi didukung pembangunan infrastruktur transportasi baru seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, serta beroperasinya moda transportasi baru di kota-kota besar seperti MRT dan LRT
- **Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum** diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan pencanangan beberapa destinasi wisata baru, serta pemasaran *'Wonderful Indonesia'*

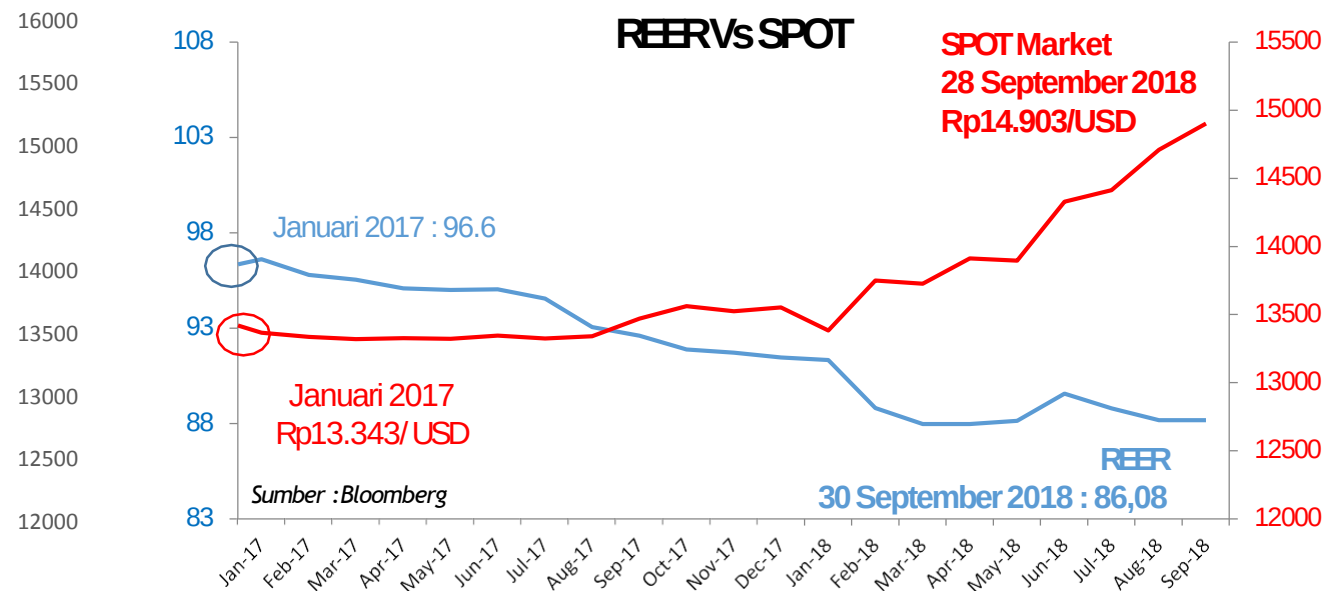
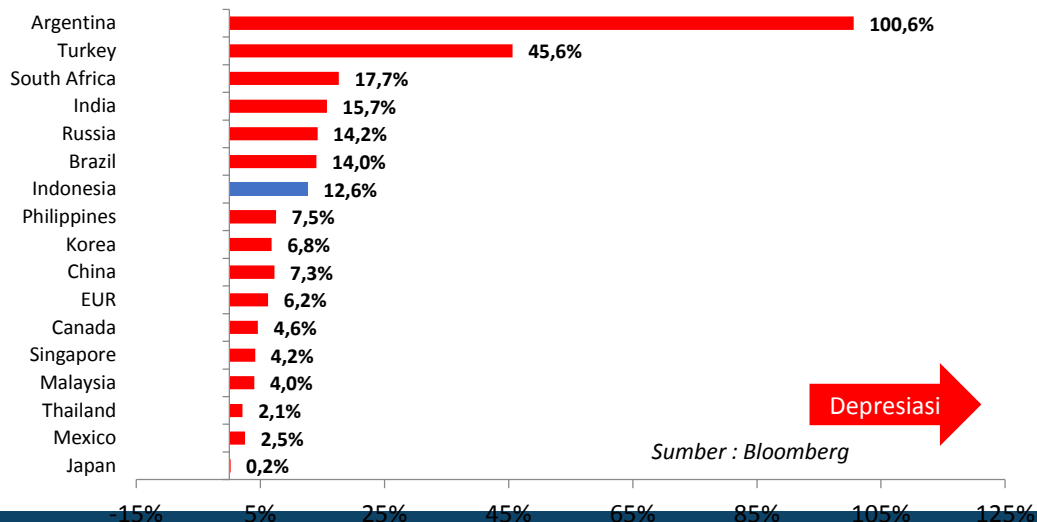
Pertumbuhan	2019
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,8
Pertambangan dan Penggalian	0,6
Industri Pengolahan	5,1
Pengadaan Listrik dan Gas	6,1
Pengadaan Air, ... dan Daur Ulang	5,0
Konstruksi	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran	5,3
Transportasi dan Pergudangan	8,8
Akomodasi Makan Minum	6,1
Informasi dan Komunikasi	10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,9
Real Estate	4,3
Jasa Perusahaan	8,2
Administrasi Pemerintahan ...	4,0
Jasa Pendidikan	5,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2
Jasa lainnya	8,8
PDB	5,3

Nilai tukar pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 15.000/USD

REER Rupiah *undervalued* → sumber potensi pendorong ekspor



Pergerakan Mata Uang Dunia terhadap Dolar (Jan-30 Okt 2018)



- Tekanan kebijakan moneter dan fiskal di AS diperkirakan masih akan memberi tekanan terhadap pasar keuangan, termasuk potensi kenaikan defisit fiskal, utang AS serta Yield Surat Utang AS (safe haven instrument)
- Tekanan dari Trade War masih akan berlangsung
- Proyeksi tekanan suku bunga dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed.
- Perkembangan kerjasama AS dengan NAFTA
- Selama Jan – Sept 2018 terjadi depresiasi nilai tukar Rupiah yang membuat REER Rupiah *undervalued*, yang dapat menjadi potensi penguatan ekspor.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Nilai tukar disesuaikan secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global



APBN menjadi lebih realistis dan kredibel



Pertumbuhan Ekonomi (%)



Inflasi (% yoy)



Nilai Tukar (Rp/USD)



Suku Bunga SPN (%)



Harga Minyak (US\$/barrel)



Lifting Minyak (ribu barrel/hari)



Lifting Gas (ribu barrel/hari)

Cost Recovery (miliar USD)

Outlook 2018

RAPBN 2019

APBN 2019

5,2

5,3

5,3

3,5

3,5

3,5

14.294

14.400

15.000

5,0

5,3

5,3

70

70

70

775

750

775

1.131

1.250

1.250

11,3

11,3

10,22

2 APBN 2019

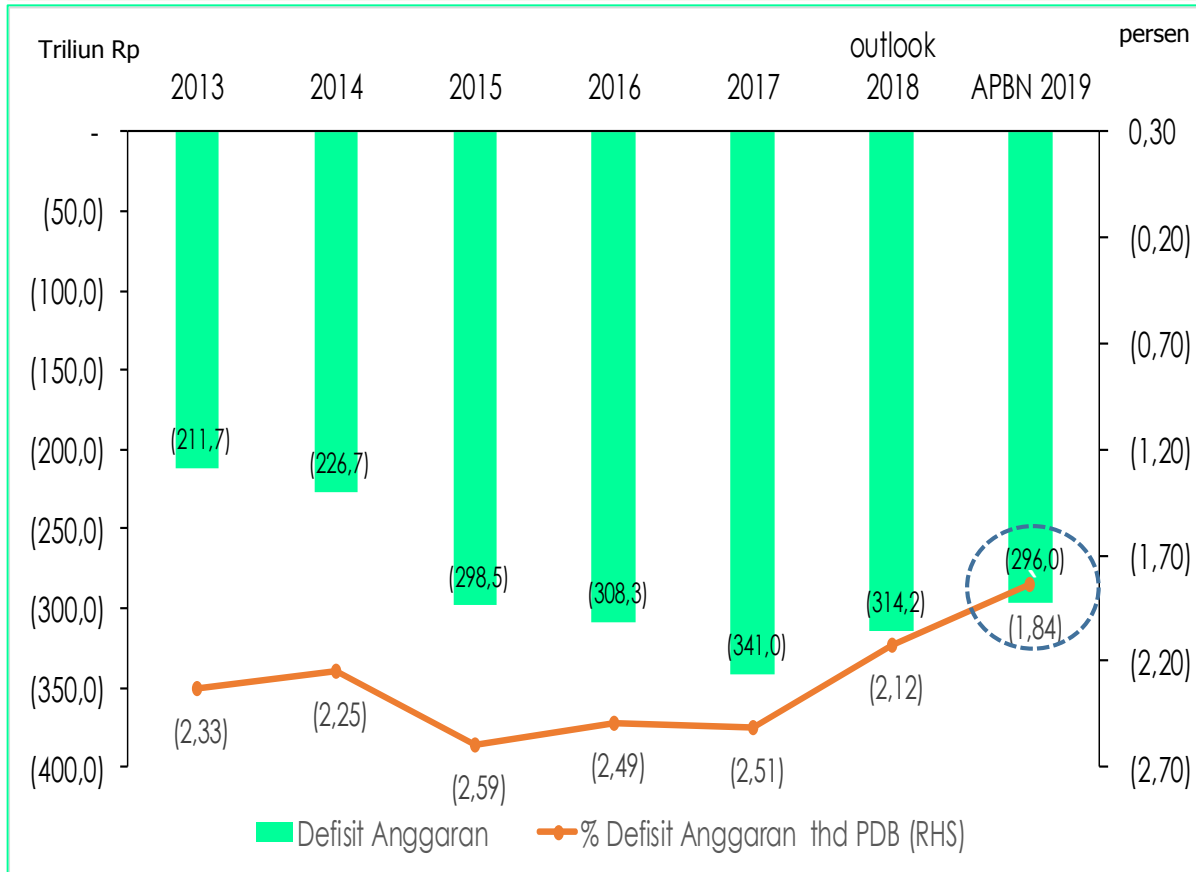


Perubahan nilai tukar dan lifting berdampak pada meningkatnya pendapatan dan belanja negara, namun defisit tetap dijaga 1,84% terhadap PDB

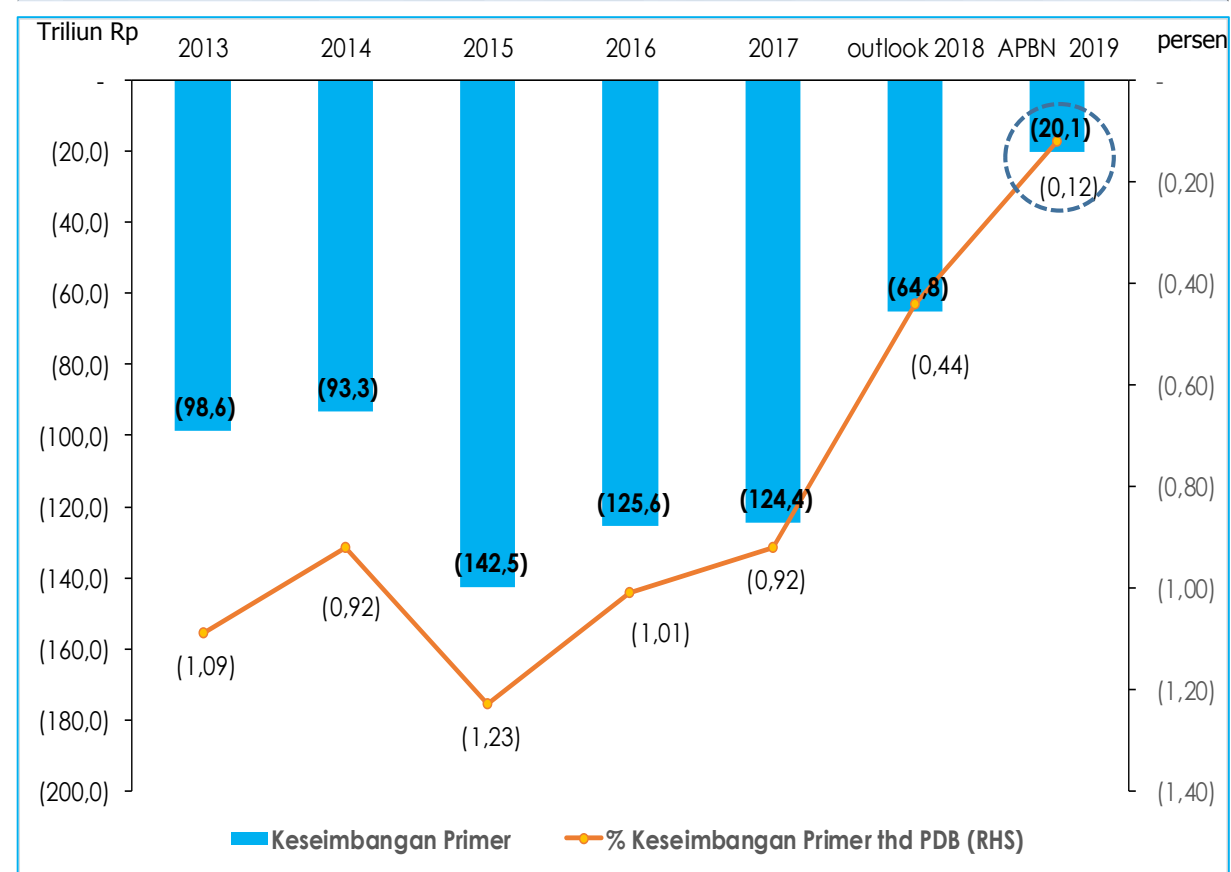
Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019		
	Outlook APBN	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.903,0	2.142,5	2.165,1	22,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.897,6	2.142,1	2.164,7	22,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.781,0	1.786,4	5,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>11,57</i>	<i>12,11</i>	<i>12,22</i>	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	361,1	378,3	17,2
II. PENERIMAAN HIBAH	5,4	0,4	0,4	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.217,3	2.439,7	2.461,1	21,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.453,6	1.607,3	1.634,3	27,0
1. Belanja K/L	813,5	840,3	855,4	15,2
2. Belanja Non K/L	640,2	767,1	778,9	11,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,6	832,3	826,8	(5,6)
1. Transfer ke Daerah	703,6	759,3	756,8	(2,6)
2. Dana Desa	60,0	73,0	70,0	(3,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(64,8)	(21,7)	(20,1)	1,6
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(314,2)	(297,2)	(296,0)	1,2
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>	<i>(1,84)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	314,2	297,2	296,0	(1,2)
I. PEMBIAYAAN UTANG	387,4	359,3	359,3	(0,0)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(74,8)	(75,9)	(1,1)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,5)	(2,3)	(2,4)	(0,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	0,0	0,0	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,2	15,0	15,0	0,0

Defisit APBN tahun 2019 semakin turun dan Keseimbangan Primer menuju arah positif

Rasio Defisit APBN diturunkan menjadi 1,84% terhadap PDB → terendah sejak 2013

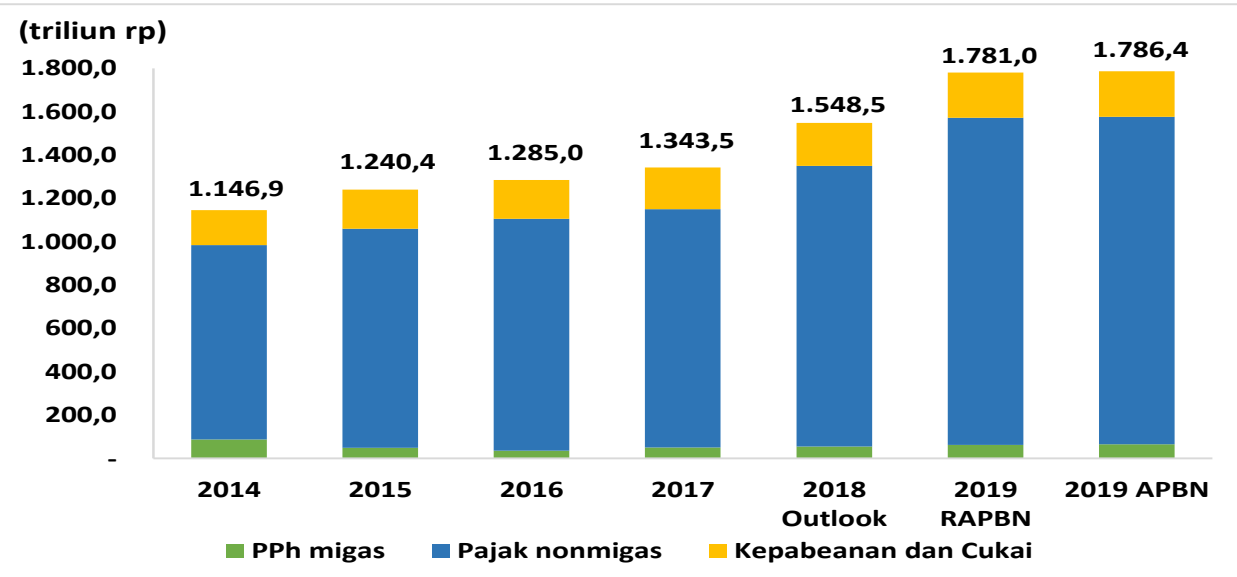


Keseimbangan Primer mendekati Rp0 → konsisten turun sejak 2015



Penerimaan Perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari *outlook* APBN 2018 → didukung reformasi perpajakan

Lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir (2008-2017 tumbuh 11,1%)



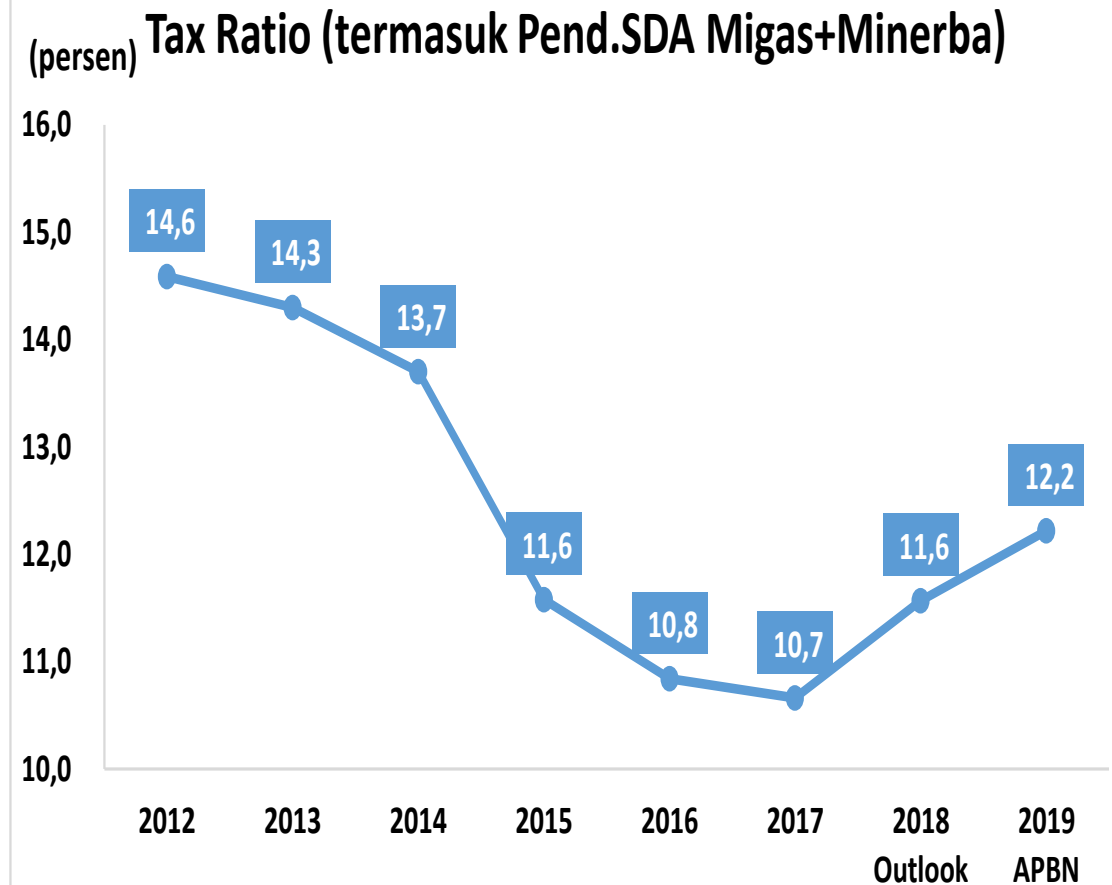
Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin meningkat → menuju kemandirian

dari 74% di tahun 2014 menjadi 82,5% di tahun 2019

Pajak tetap Menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing

Insentif fiskal (Tax Allowance, Tax Holiday)

Tax ratio terus meningkat → 12,2% di tahun 2019



Kebijakan Perpajakan diarahkan untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing

KEBIJAKAN PAJAK 2019



Penguatan Pelayanan Perpajakan

- simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan
- perluasan cakupan *e-filing*, dan
- kemudahan restitusi



Penegakan Hukum

- Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara berkeadilan
- Peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan



Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

- Implementasi AEOI dan akses informasi keuangan
- Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca *tax amnesty*
- Penanganan UMKM secara *end-to-end* melalui pendekatan *Business Development Services* (BDS)
- Joint Program* DJP-DJBC
- Pembenahan basis data perpajakan
- Penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko (*Compliance Risk Management* /CRM)

KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2019



Memperbaiki *dwelling time*, a.l :

- ✓ Percepatan layanan Pusat Logistik Berikat
- ✓ Simplifikasi prosedur impor
- ✓ Pembayaran BM & Pajak 24x7 (dgn MPN G2) → termasuk layanan kepabeanan 24x7



Melanjutkan **pemberantasan penyelundupan, dan penertiban barang kena cukai ilegal** (rokok, miras)



Penurunan/efisiensi biaya logistik



Melanjutkan **penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi** (PIBT, PEBT dan PCBT) → Sinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan



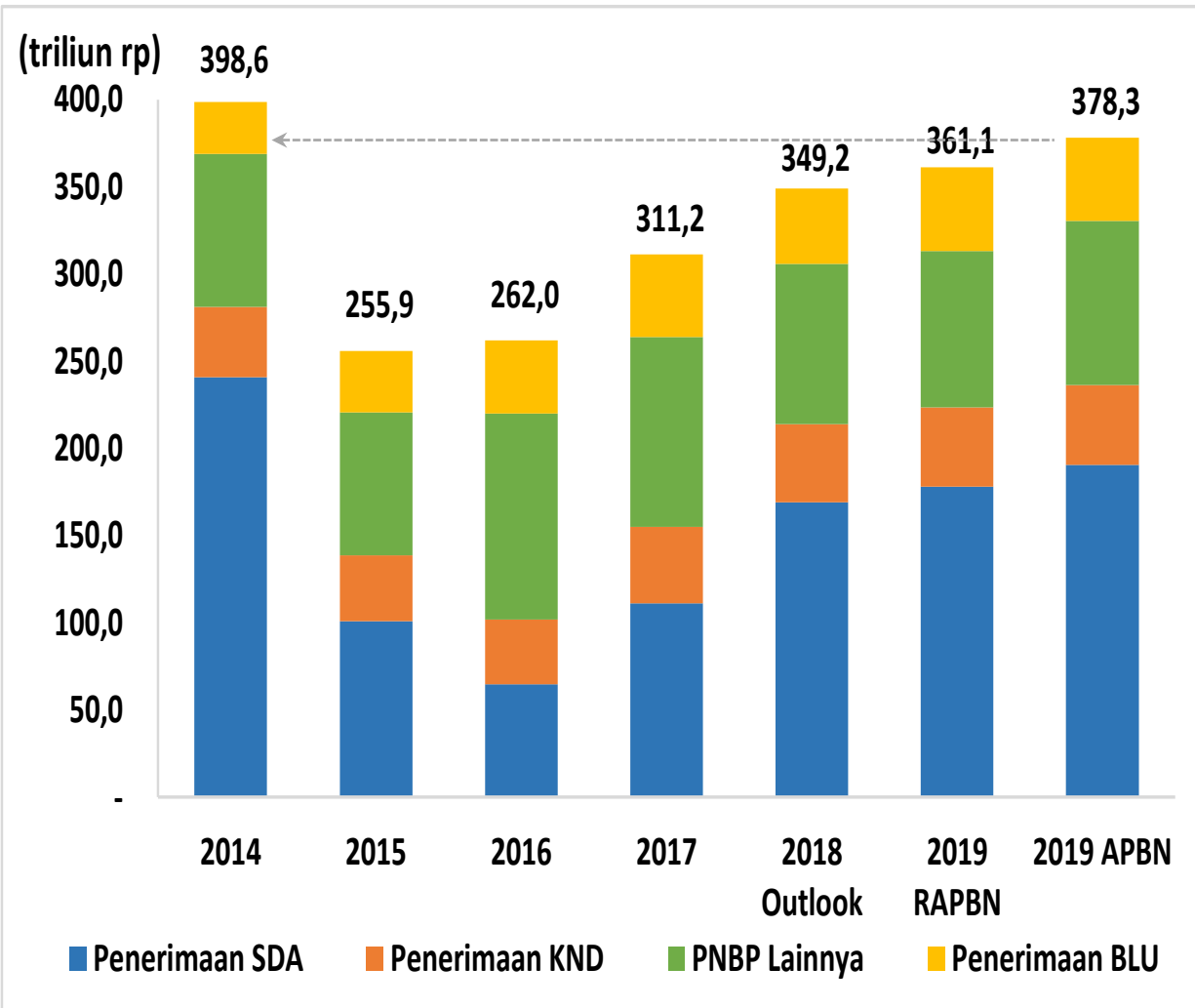
Pengembangan/perluasan fasilitas **kemudahan impor tujuan ekspor** (KITE) untuk **industri kecil dan menengah (IKM)**



Penambahan **barang kena cukai (BKC) baru (kemasan plastik)**

PNBP tahun 2019 ditargetkan tumbuh 8,35% dari *outlook* tahun 2018

Didorong kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas dan volume layanan, serta perbaikan tata kelola



KEBIJAKAN UMUM PNBP



Optimalisasi produksi

diikuti upaya **efisiensi biaya** dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha



Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha serta **optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**



Peningkatan dividen BUMN

dengan mempertimbangkan **cashflow BUMN** dan kemampuan keuangan BUMN dengan pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah



Penggunaan Teknologi Terintegrasi/ Terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP



Tindak Lanjut Perubahan UU PNBP

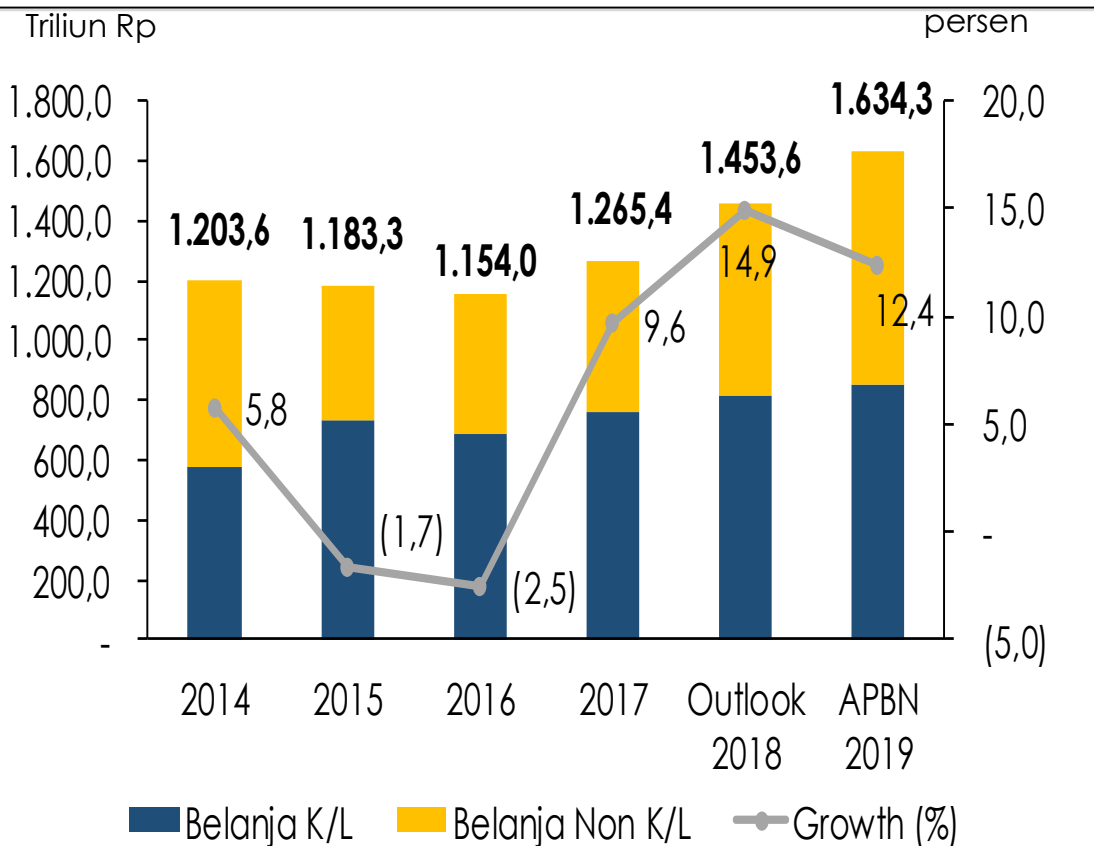
- Penyederhanaan tarif PNBP, khususnya terkait layanan
- Penajaman perencanaan, pelaksanaan & pertanggung jawaban PNBP
- Penguatan pengawasan dan pemeriksaan PNBP
- Rumusan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp27,0 T dari usulan RAPBN tahun 2019 (kenaikan belanja K/L Rp15,2 T dan belanja non K/L Rp11,8 T)

(triliun rupiah)

Mendukung peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, diikuti dengan penguatan *value for money*

Menampung inisiatif strategis (a.l. rehab rekon bencana alam, agenda demokrasi)



Alokasi 2019

1.634,3 (RAPBN: 1.607,3)

Outlook 2018: 1.473,1

Belanja K/L

855,4 (RAPBN: 840,3)



- Peningkatan kualitas aparatur negara dengan penguatan reformasi birokrasi
- Penguatan bantuan sosial
- Optimalisasi belanja modal
- Pengendalian belanja barang

Belanja Non K/L

778,9 (RAPBN: 767,1)



Antara lain:



Bunga Utang

- Menjaga akuntabilitas pengelolaan utang
- Pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan lindung nilai
- Melakukan penurunan pertumbuhan pembiayaan utang



Subsidi Energi

- difokuskan subsidi yang lebih tepat sasaran
- menuju penyaluran non tunai
- Melanjutkan subsidi terbatas solar
- Peningkatan penggunaan energi terbarukan



Subsidi Nonenergi

- difokuskan pada kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran

Belanja K/L diarahkan untuk mendukung SDM, infrastruktur, perlindungan sosial, agenda demokrasi & upaya menjaga stabilitas hankam

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	(triliun rupiah)		
		2019 RAPBN	2019 APBN	Selisih
1	KEMEN PUPR	110,7	110,7	-
2	KEMENHAN	107,2	108,4	1,2
3	POLRI	76,2	86,2	10,0
4	KEMENAG	62,1	62,1	-
5	KEMENSOS	58,9	58,9	-
6	KEMENKES	58,7	58,7	-
7	KEMENKEU	45,2	45,2	-
8	KEMENHUB	41,6	41,6	-
9	KEMENRISTEK DIKTI	41,3	41,3	-
10	KEMENDIKBUD	36,0	36,0	0,01
-	Jumlah 10 K/L Terbesar	637,8	649,0	11,2
-	Lainnya	202,5	206,5	4,0
JUMLAH		840,3	855,4	15,2

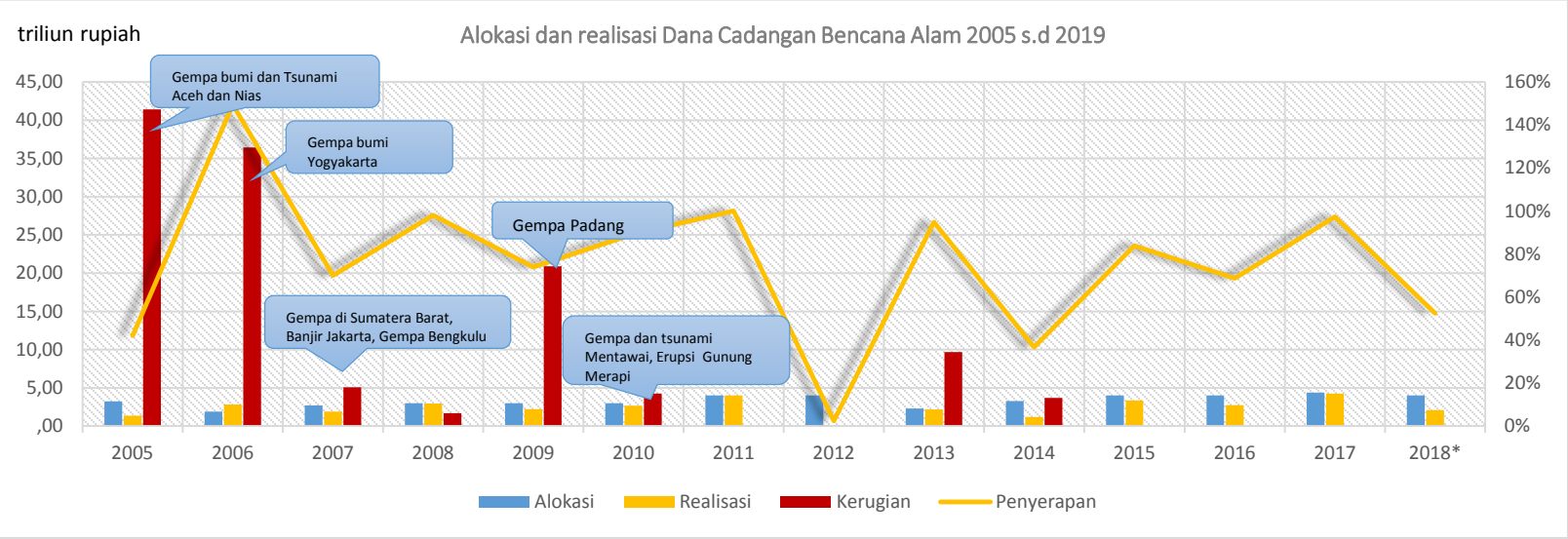
Belanja K/L diarahkan untuk:

1. Peningkatan **investasi di bidang pendidikan** untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memperkuat PIP, BOS, beasiswa, vokasi, dan mempercepat rehab sekolah.
2. Penguatan **program perlindungan sosial** melalui perluasan JKN, serta peningkatan besaran manfaat PKH.
3. Menjaga kesinambungan **pembangunan infrastruktur** untuk pemerataan pembangunan.
4. Memperkuat **reformasi birokrasi** dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi.
5. Mensukseskan pelaksanaan **pesta demokrasi**, dan menjaga **stabilitas pertahanan dan keamanan**.

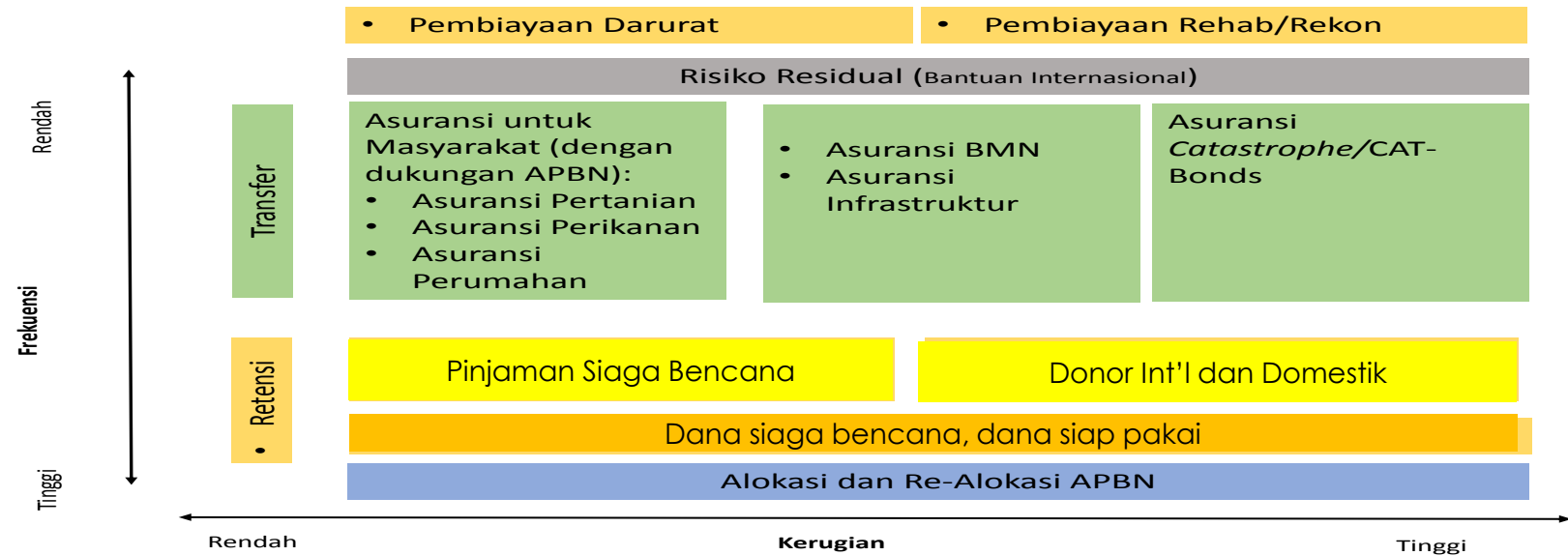
Didukung perbaikan pelaksanaan anggaran:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan melalui **lelang dini**
2. **monitoring & evaluasi** dengan lebih komprehensif dan terkoordinasi melalui sinergi sistem informasi

APBN tahun 2019 akan mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan untuk mitigasi risiko bencana

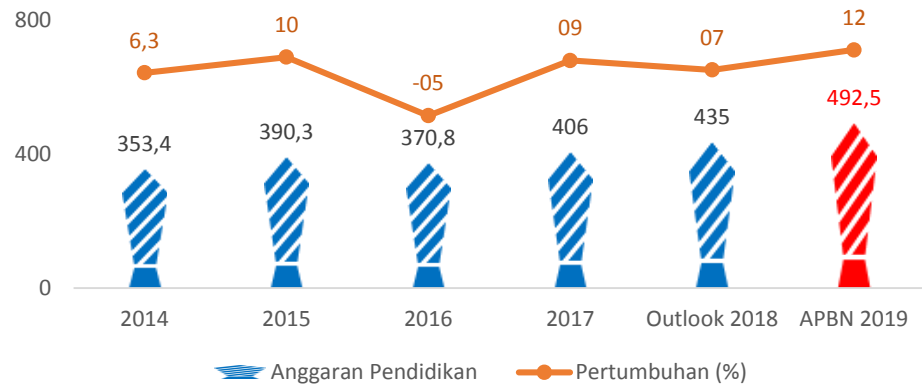


Skema Pembiayaan Risiko Bencana Alam Ke Depan



1. Mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko dan skema APBN;
2. Melanjutkan skema asuransi yang telah ada (asuransi pertanian dan asuransi nelayan), dan melakukan *piloting* untuk Asuransi Barang Milik Negara
3. Membentuk dana penanggulangan bencana alam yang dikelola khusus;
4. Sumber-sumber pendanaan:
 - ✓ APBN (Rupiah Murni)
 - ✓ PHLN termasuk pinjaman siaga bencana
 - ✓ Kontribusi daerah
 - ✓ Sumber lain yang sah

Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20% APBN, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM



Triliun Rupiah	2018		2019	
		APBN	RAPBN	
● Melalui Belanja Pusat	149,7	163,1	158,0	
Kemendikbud	40,1	36,0	36,0	
Kemenag	52,7	51,9	51,9	
Kemenristekdikti	40,4	40,2	40,2	
Kemen PUPR	-	6,6	6,6	
● Melalui Transfer	279,5	308,4	309,9	
DAU*)	153,2	168,8	168,6	
DAK Fisik	9,1	16,9	18,7	
DAK Non Fisik	112,3	117,7	117,7	
● Melalui Pembiayaan	15,0	21,0	20,0	
(Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan Dana Abadi Penelitian)				

Anggaran pendidikan melalui belanja pusat termasuk tambahan untuk **Polri, TNI, BPPT Rp1,25 T**

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019



Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Akses

- Peningkatan efektivitas BOS → BOS berdasarkan kinerja dan afirmasi
- Kelanjutan Program Indonesia Pintar diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kemen PU PR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR)
- Perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi
- Pengalokasian dana abadi penelitian
- Enforcement pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda
- Penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan link and match dengan industri



Program
Indonesia
Pintar

20,1
Juta siswa



Bantuan
Operasional
Sekolah

57,0
juta siswa

Kemenag dan DAK



Beasiswa
Bidik Misi

471,8 ribu
mahasiswa

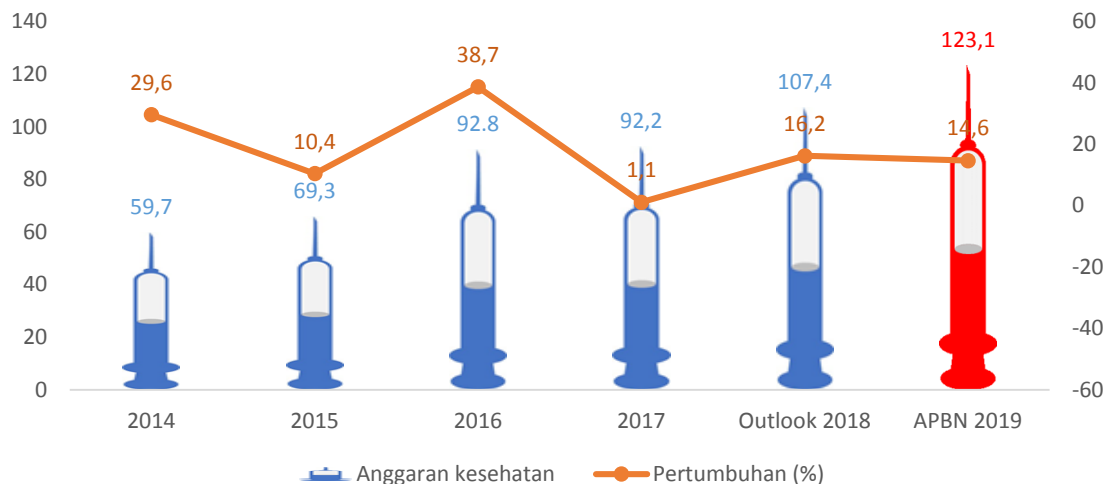


Pembangunan/
Rehab Ruang
Kelas

56,1 ribu
Kemendikbud, Kemenag,
Kemen PUPR, dan DAK

*) angka sementara

Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting



	2018	2019 APBN	2019 RAPBN
● Melalui Belanja Pusat	81,5	89,8	88,2
Kemenkes	59,1	58,7	58,7
B POM	2,2	2,0	2,0
BKKBN	5,5	3,8	3,8
JKN PNS/TNI/POLRI	5,4	5,8	5,8
● Melalui Transfer	29,5	33,4	33,7
DAK Fisik	18,0	19,9	20,3
BOK dan BOKB	10,4	12,2	12,2

Anggaran kesehatan melalui belanja pusat termasuk tambahan untuk **Polri dan TNI Rp1,0 T**

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Akses

- Perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (2019: 96,8 juta jiwa) → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- Percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 Kabupaten kota (2018:100 kab/kota).
- Melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan untuk keberlangsungan program JKN



Prevalensi Stunting
24,8%



Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
300



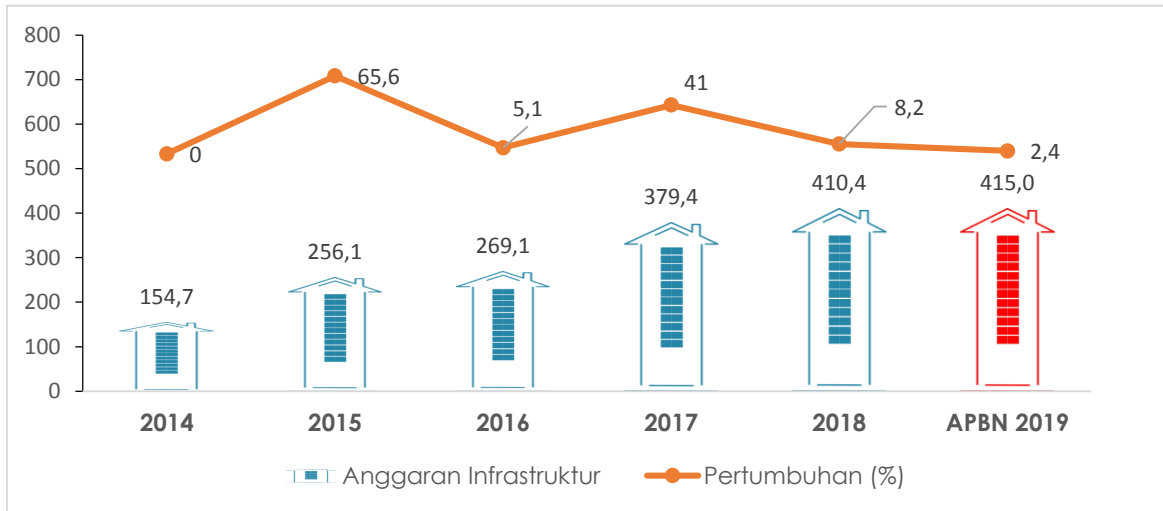
Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk
245



Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI)
96,8

*) angka sementara

Pembangunan infrastruktur diakselerasi melalui terobosan pembiayaan kreatif



Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

- Perbaikan eksekusi proyek infrastruktur;
- Peningkatan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda;
- Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU AP.

Triliun Rupiah		2018	2019	
			APBN	RAPBN
●	Melalui Belanja Pusat	183,0	173,8	173,8
	Kemen PU Pera*	104,7	108,2	108,2
	Kemenhub*	44,2	38,1	38,1
*) alokasi belanja di luar belanja pegawai				
●	Melalui Transfer	184,1	196,2	201,7
	DAU dan DBH non earmark**	122,1	130,4	129,0
	DAK	33,9	33,5	39,1
	Dana Desa	24,0	28,0	29,2
**) pemanfaatan 25% untuk bidang infrastruktur				
●	Melalui Pembiayaan	48,1	45,0	45,0
a.l.	PMN	6,1	17,8	17,8
	LMAN	35,4	22,0	22,0
*) c				

*) angka sementara



Pembangunan / rekonstruksi/ Pelebaran Jalan (km)

2.007



Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan (m)

27.067



Pembangunan Bandara baru (unit)

4



Pembangunan/ Penyelesaian Rel KA (km'sp)

415,2



Jaringan Irigasi (ribu hektar)

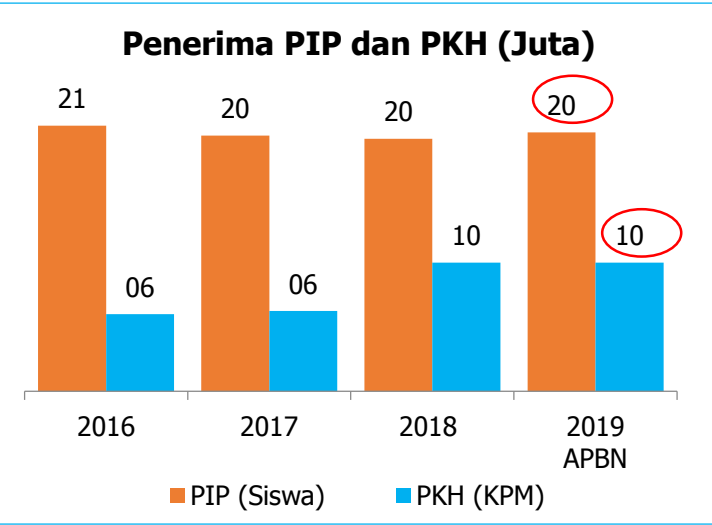
162



Bendungan (unit)

48

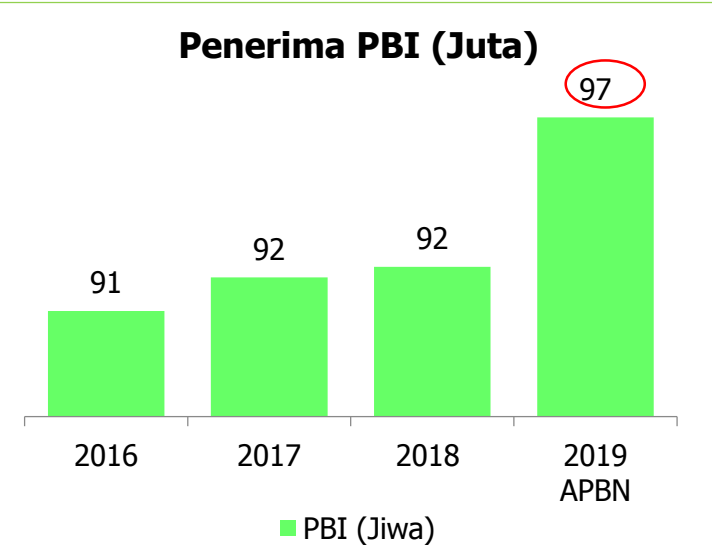
Komitmen Pemerintah untuk memberikan Perlindungan Sosial dan Meningkatkan Kesejahteraan Bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah



PIP:
Mendukung pencapaian target APM

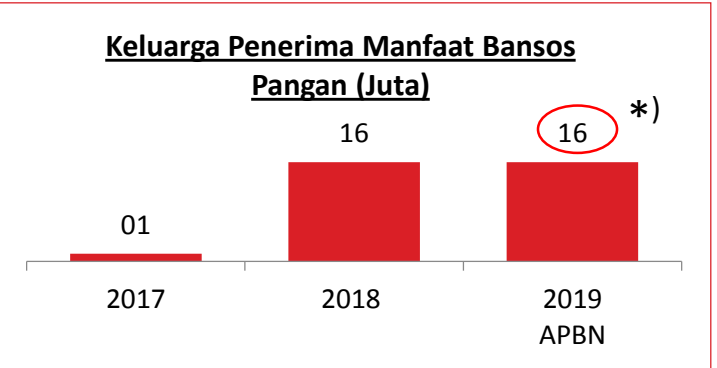
PKH

- a. Perluasan sasaran dari 3,5 juta (2015) menjadi 10 juta KPM
- b. 2019: Alokasi PKH meningkat menjadi Rp34,4 triliun (2018:Rp19,3 triliun) untuk mendukung peningkatan nilai manfaat menjadi dua kali lipat bagi 10 juta keluarga miskin.
- c. Dinilai paling efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan



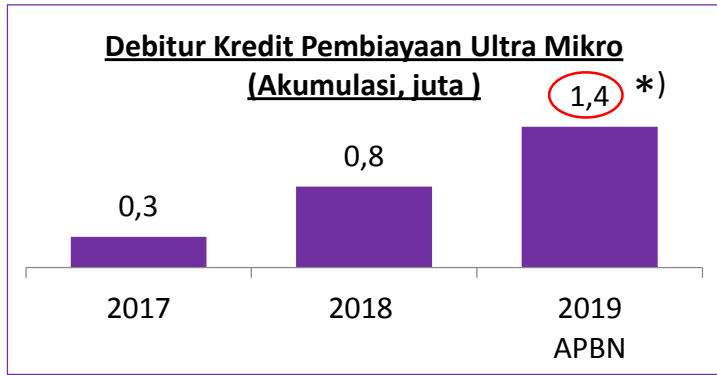
PBI

- a. 2015-2019 : perluasan cakupan PBI dari 86,4 juta jiwa (2015) menjadi 96,8 juta (2019) → mendukung UHC
- b. 2016 : penyesuaian bantuan dari Rp19.225,- menjadi Rp23.000,- per orang per bulan



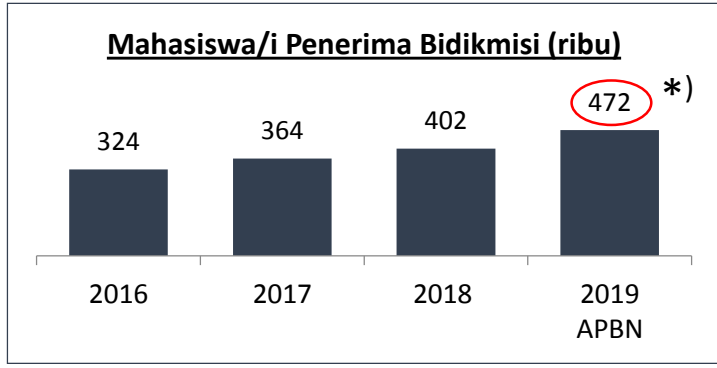
Bansos Pangan:

- Perubahan mekanisme penyaluran menjadi BPNT untuk:
 - menjamin ketepatan sasaran, waktu dan jumlah; dan
 - memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk memilih jenis, bahan pokok yang diperlukan
- Perluasan KPM BPNT dari 1,2 juta (2017), 10 juta (2018) dan direncanakan 15,6 juta (2019)



Kredit Ultra Mikro:

- Peningkatan jumlah sasaran penerima kredit Umi dari 0,3 juta debitur menjadi 1,4 juta debitur (kumulatif)
- Perluasan segmen debitur kepada usaha mikro pesantren



Bidikmisi:

- Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima bidikmisi dari 269,2 ribu Mahasiswa (2015) menjadi 471,8 ribu mahasiswa (2019)

Catatan : *) angka sementara

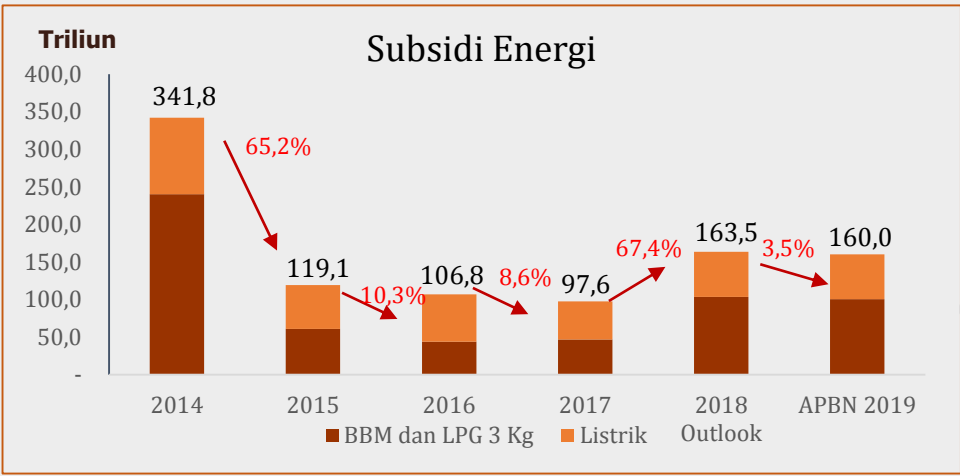
Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai

● APBN 224,3

● RAPBN 220,9

(triliun rupiah)

Subsidi Energi meningkat, terutama karena perubahan asumsi nilai tukar



160,0

156,5

Subsidi BBM & LPG

100,7

100,1

- Melanjutkan **subsidi terbatas solar**
- **Perbaiki sasaran** penerima LPG: rumah tangga, usaha mikro, kapal bagi nelayan kecil

Subsidi Listrik

59,3

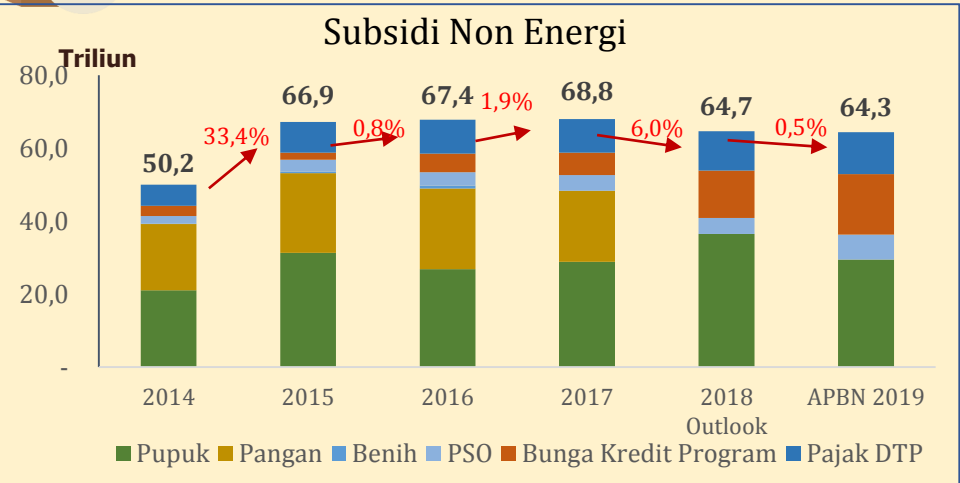
56,5

- **Subsidi tepat sasaran** untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA
- Peningkatan **rasio elektrifikasi**

Subsidi Non-energi ditetapkan sama sesuai usulan Pemerintah dalam RAPBN 2019

64,3

64,3



Subsidi Pupuk 29,5

Untuk mendukung ketahanan pangan yang disesuaikan dengan **update luas lahan pertanian**

Subsidi Bunga KUR 12,0

Target penyaluran KUR **Rp120 T** dengan suku bunga **7%** yang diperuntukkan **pembiayaan sektor produktif** bagi UMKM dan TKI

Subsidi Bunga Kredit Perumahan 3,5

Subsidi kredit perumahan bagi MBR dengan penerbitan sebanyak **100 ribu** unit

Peningkatan TKDD untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah, disertai prinsip *Value For Money*



Peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara **proporsional** (sesuai kebutuhan daerah, kapasitas daerah dan kemampuan keuangan negara)



Mendukung **kebutuhan pendanaan daerah** (untuk penyelenggaraan layanan dan pembangunan)



Fokus untuk **mengurangi kesenjangan layanan** antar-daerah



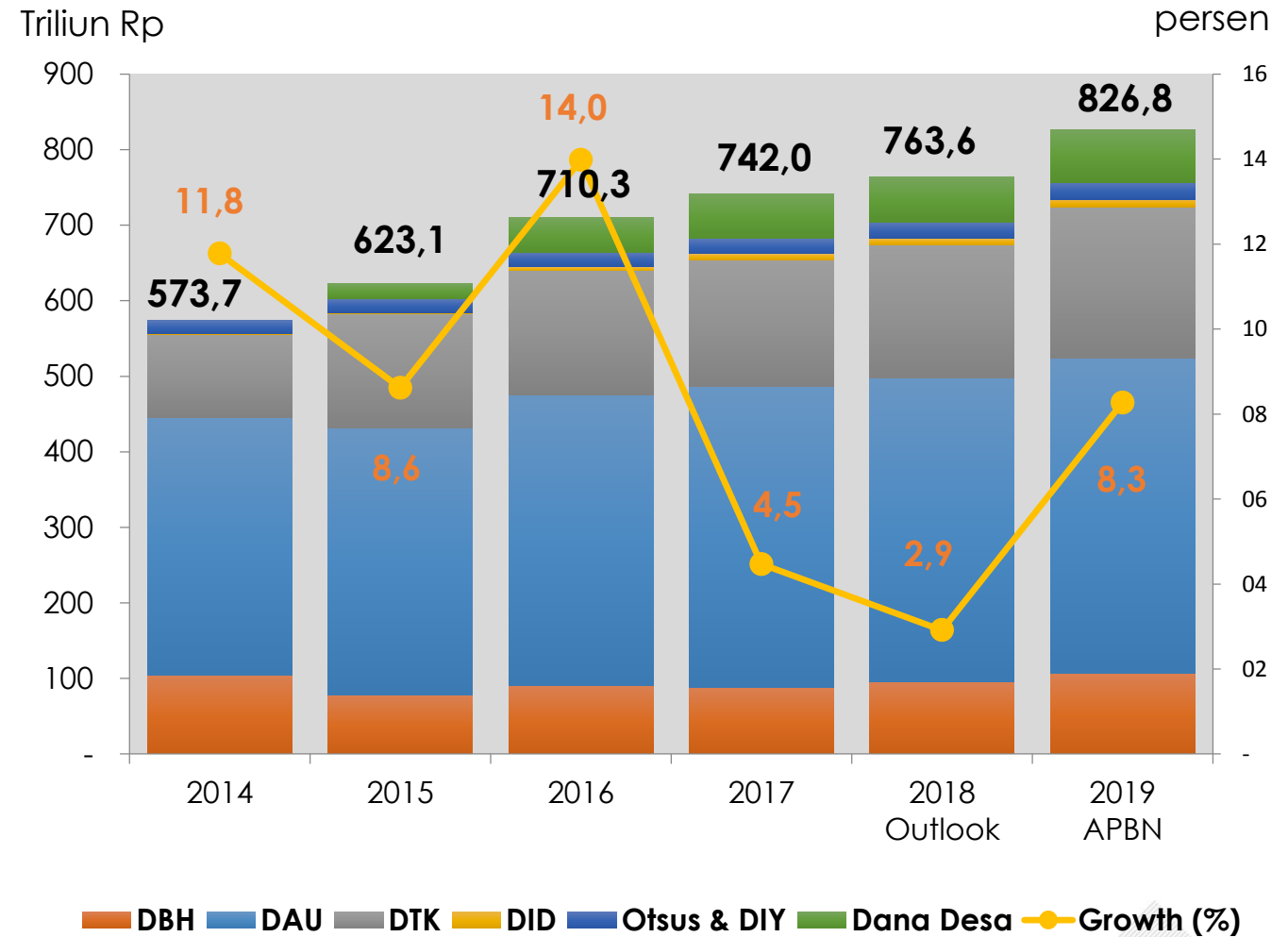
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran TKDD dengan belanja K/L



Menjaga **kesinambungan program pembangunan** 5 tahun (Pembangunan SDM, Konektivitas, destinasi pariwisata, pengurangan kemiskinan, penguatan Dana Desa)



Mendorong penggunaan belanja di daerah yang **efektif, efisien, dan produktif** berdasarkan prinsip *value for money*.



Pemerintah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan

826,8
832,3

TKDD

Dana Bagi Hasil 106,4 104,0

1. Minimal 50 persen dari DBH CHT untuk **mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**.
2. Penyelesaian **Kurang Bayar DBH pada Triwulan IV**.
3. Sharing beban subsidi BBM dan LPG dalam hal terdapat kenaikan realisasi PNBPN Migas.

Dana Alokasi Umum 417,9 414,9

1. Dana Kelurahan sebesar **Rp3,0 T ditujukan bagi 8.212 kelurahan** di seluruh kab/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat (Dasar hukumnya **UU tentang APBN Tahun 2019** dan pelaksanaannya diatur dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri**).
2. Pagu DAU **bersifat final** untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD.
3. Memperhitungkan **kenaikan gaji pokok 5 persen, gaji ke 13, dan THR, serta Formasi CPNS Daerah**.

DAK Fisik 69,3 77,2

1. Fokus pada pembangunan SDM melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas
2. Sesuai usulan daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan memperhatikan aspirasi program pembangunan anggota DPR.
3. Penambahan sub-bidang GOR dan Perpustakaan Daerah.

DAK Nonfisik 131,0 131,2

1. Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja).
2. Peningkatan *unit cost* BOS untuk Pendidikan Vokasi.
3. Afirmasi untuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi).
4. Penambahan DAK Nonfisik baru yaitu BOP untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan taman budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana BLPS

Dana Desa
2019 : 70,0
2018 : 60,0
2015 : 20,8

1. Penyempurnaan **formulasi dan afirmasi** untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
2. Penyempurnaan **skema padat karya tunai (cash for work)**.
3. Penyaluran berdasarkan pada **kinerja pelaksanaan dan capaian output**.
4. Penguatan **monev, kapasitas SDM desa, dan tenaga pendamping desa**.

Rata-Rata Per Desa :

2019 : Rp933,9 juta
2018 : Rp800,5 juta
2015 : Rp280,0 juta

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

*Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai **PP No.7/2018 tentang Kecamatan** untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan*

ALOKASI

PAGU 2019 **Rp3 T**

Dalam bentuk **DAU TAMBAHAN**

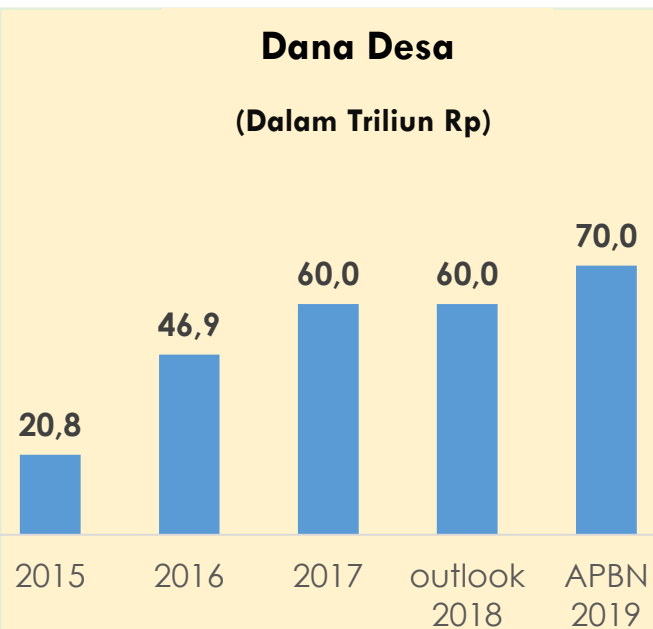
- KEBIJAKAN ini bersifat **melengkapi** tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**.
- **Memperkuat pengawasan** dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tsb bagian dari Belanja APBD.
- **Pengendalian** melalui penyaluran dan **penguatan pemantauan dan evaluasi**.

SASARAN

- dialokasikan untuk **8.212** kelurahan pada **410** kabupaten/kota.
- dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

KATEGORI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KELURAHAN	DAU PERKELURAHAN	PAGU
SATUAN	DAERAH	KELURAHAN	JUTA	MILIAR
BAIK	91	2.805	352,94	990,00
PERLU DITINGKATKAN	257	4.782	370,14	1.770,00
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	62	625	384,00	240,00
TOTAL	410	8.212		3.000,00

Dana Desa Tahun 2019 untuk meningkatkan layanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa"



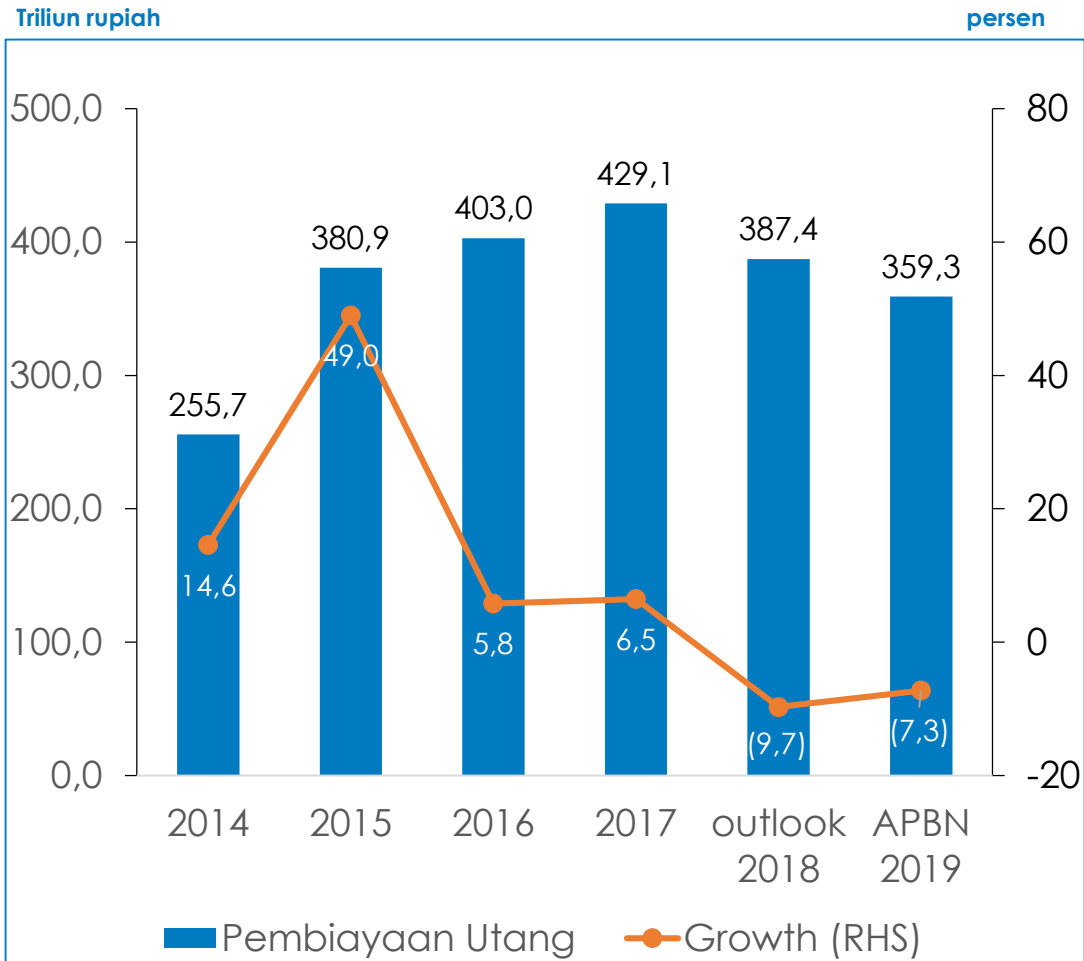
Output			(2015 s.d. 2018)
	JALAN DESA (123,8 ribu kilometer)		
	SANITASI DAN AIR BERSIH (38.331 unit)		
	POSYANDU (11.574 unit)		
	PAUD DESA (18.177 unit)		

2014	Outcome	2018
RASIO GINI PERDESAAN 0,34		0,32
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERDESAAN 17,37 Juta		15,81 Juta
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERDESAAN 14,2%		13,2%

TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN 2019
Penggunaan Dana Desa belum Optimal	Fokus pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa.
Kapasitas Perangkat Desa belum memadai	Penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa.
Penyediaan Pendamping Desa: ▪ Kompetensi belum memadai ▪ Proses rekrutmen lama ▪ Mobilisasi yang terlambat	
Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa	Penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Pembiayaan Utang menurun dalam 2 tahun terakhir Menunjukkan Kesehatan dan Kemandirian APBN

Pertumbuhan pembiayaan utang cenderung menurun dari tahun 2015, dan bahkan tumbuh negatif di tahun 2018 dan 2019



Tantangan 2019

- Lanjutan kenaikan *Fed rate*
- Penghentian *QE* di Eropa dan Jepang
- Tekanan defisit neraca transaksi berjalan



Strategi Pembiayaan Utang 2019

- Utang diprioritaskan dalam Rupiah agar tetap *resilient* terhadap gejolak nilai tukar
- Potensi investor domestik dioptimalkan untuk pendalaman pasar sekaligus mengendalikan kepemilikan asing

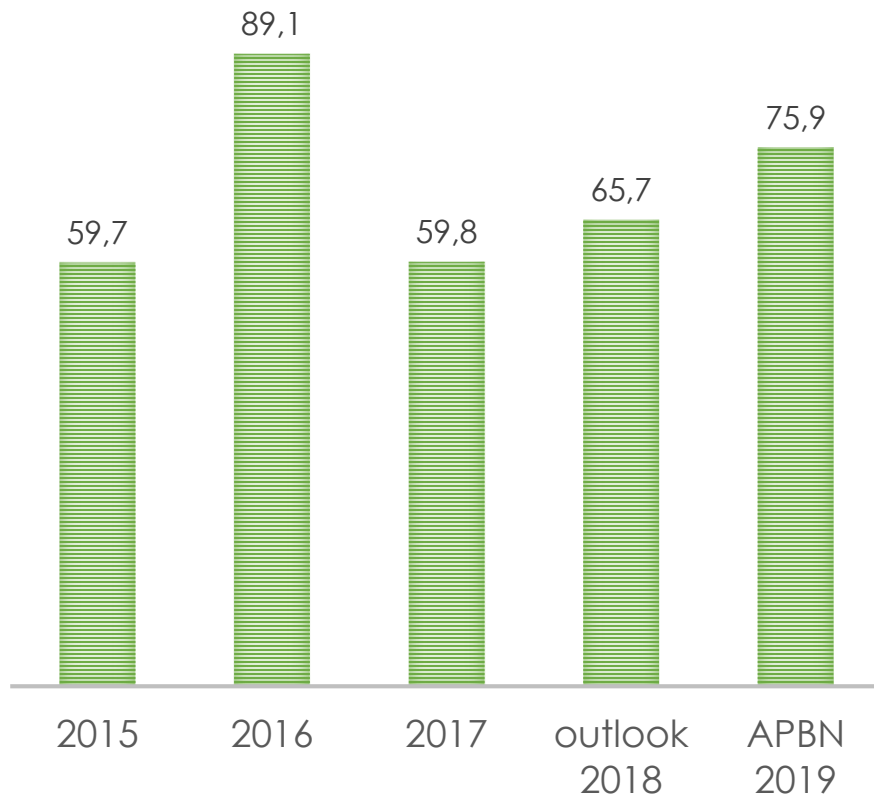


Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

- **Hati-hati**
menjaga rasio utang terhadap PDB.
- **Efisiensi**
 - Menjaga akuntabilitas pengelolaan utang
 - Meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali
- **Produktif**
 - pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;
 - menjaga komposisi utang dalam batas *manageable*;
 - menjaga solvabilitas.

Pembiayaan Investasi Tahun 2019 dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan anggaran infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan daya saing ekspor dan peran serta Indonesia di dunia internasional

Perkembangan Pembiayaan Investasi (triliun rupiah)



● 2019 ● 2018 (triliun rupiah)



BLU LMAN : 22,0 35,4

Pembebasan lahan untuk prioritas pembangunan nasional



DPPN : 20,0 15,0

Peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan



PMN kepada LPEI : 2,5 0

Penugasan khusus peningkatan ekspor nasional



PMN kepada BUMN : 17,8 3,6

- PT PLN Rp6,5 T
Pencapaian target rasio elektrifikasi
- PT Hutama Karya Rp10,5 T
Penugasan jalan tol trans sumatera
- PT SMF Rp800 M
Dukungan pembiayaan perumahan



BLU PPDPP : 5,2 2,2

Peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR



BLU PIP: 3,0 2,5

Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif



Organisasi/LKI/BUI : 2,4 2,2

Mempertahankan porsi kepemilikan saham dan hak suara Indonesia pada organisasi/LKI



LDKPI : 2,0 1,0

Pengelolaan dana kerjasama pembangunan internasional



Dana Abadi Penelitian : 1,0

Dana Abadi untuk kegiatan penelitian

Kesimpulan



Postur APBN Sehat, Adil, dan Mandiri

- Antisipatif dan fleksibel menghadapi dinamika perekonomian global
- Defisit anggaran terendah sejak 2013
- Keseimbangan primer mendekati Rp0
- Pembiayaan utang menurun



Penerimaan negara terus dioptimalkan

- Optimal namun tetap realistis
- Tetap menjaga iklim usaha & investasi
- Peningkatan PNBP melalui peningkatan layanan dan tata kelola



Belanja negara semakin produktif

- Reformasi belanja negara fokus untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi
- Penguatan value for money
- Sinergi pusat dan daerah
- Semakin transparan dan akuntabel



Memperkuat belanja untuk bencana alam dan mempercepat pembangunan di daerah

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Prov. NTB dan Sulteng
- Memperkuat Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



KERJA KITA
PRESTASI BANGSA